

**RENCANA AKSI
KEUANGAN
BERKELANJUTAN
2024**

PT. BPR PRIMA DEWATA

I. RINGKASAN EKSEKUTIF ¹

1. Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
PT. BPR PRIMA DEWATA yang tergolong BPRKU1 dan pertama kali menerapkan keuangan berkelanjutan mulai tahun 2024, sehingga pada tahun 2023 belum ada pencapaian rencana aksi keuangan berkelanjutan.

2. Visi dan Misi

Visi dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan:

Menjadi BPR yang sehat, handal, terpercaya dan utama dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Misi dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan:

Melakukan kegiatan usaha keberlanjutan yang menghasilkan pertumbuhan yang berkesinambungan dan terintegrasi

3. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Peningkatan kualitas tata kelola bank dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan hidup serta peningkatan portfolio kredit pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan.

4. Program yang akan Dilaksanakan

4.1. Rencana aksi 1 tahun

No	Bulan	Uraian Kegiatan
1.	Januari	Mengadakan sosialisasi khusus untuk bidang perkreditan tentang Aksi keuangan berkelanjutan
2.	Februari	Edukasi kepada masyarakat mengenai produk, keaslian uang dan perencanaan keuangan berkelanjutan
3.	Maret	Kegiatan berbagi takjil dalam rangka bulan Puasa
4.	April	Penggunaan Lampu hemat energi/lampu menggunakan energi matahari
5.	Mei	Kegiatan efisiensi penggunaan kertas
6.	Juni	Kegiatan pengurangan sampah plastik
7.	Juli	Pembaharuan standar operasional sesuai perkembangan peraturan terkait Aksi Keuangan Berkelanjutan
8.	Agustus	Kebijakan pemberian kredit (mengenai penanggulangan dampak polusi)
9.	September	Alokasi dana untuk bantuan Pembangunan tempat ibadah atau fasilitas umum
10.	Oktober	Kegiatan Edukasi dan Literasi mengenai produk, perencanaan keuangan

 2 A

4.2. Rencana aksi 5 tahun

No	Tahun	Uraian Kegiatan
1.	2024	a. Melakukan Sosialisasi terkait Kegiatan Keuangan Berkelanjutan b. Melakukan kajian terkait: <ul style="list-style-type: none">• permintaan pasar terhadap produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan• kesesuaian produk dan/atau jasa yang sudah ada dengan kriteria kegiatan usaha berkelanjutan• pengembangan produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan• integrasi manajemen risiko sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam aktivitas bisnis
2.	2025	Memperluas Pangsa pasar khususnya pemberian produk dengan kreteria kegiatan usaha berkelanjutan
3.	2026	Mengadakan Analisa terhadap pencapaian ditahun 2025, serta meningkatkan produk serta jasa keuangan Berkelanjutan.
4.	2027	Merencanakan pengembangan produk dengan kreteria kegiatan usaha berkelanjutan
5.	2028	Melakukan Kerjasama dengan Perusahaan pelayanan public dalam hal pembiayaan Fasilitas untuk Kesehatan Masyarakat

5. Alokasi Sumber Daya

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, BPR akan mengalokasikan sumber daya berupa

- 1) Biaya pelatihan sebesar 10 % dari biaya Pendidikan tahun 2024.,
- 2) Biaya Inklusi dan literasi sebesar 10% dari biaya inklusi dan literasi tahun 2023

6. Penanggung Jawab

Penanggung jawab kegiatan untuk bidang Perkreditan : Kabag Kredit

Penanggung jawab kegiatan untuk bidang Literasi dan Edukasi : Kabag SDM dan Umum

II. PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

1. Rujukan

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

2. Keterlibatan Para Pihak

Penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan ini disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

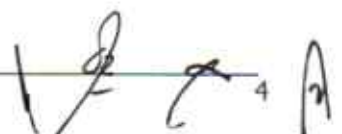
 3 A

III. FAKTOR PENENTU RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

1. Rencana strategis bisnis
 - a. Pemanfaatan peluang dan prospek usaha
Usaha BPR Prima Dewata berfokus pada pemberian kredit kepada masyarakat dengan skala usaha kecil dan menengah.
 - b. Peningkatan Akses Keuangan
BPR telah memiliki Web untuk mempermudah calon nasabah untuk memperoleh informasi serta layanan perbankan yang dibutuhkan
2. Kapasitas organisasi
 - a. Kepengurusan
PT. BPR. PRIMA DEWATA telah memiliki jumlah pengurus yang lengkap, yaitu 2(dua) anggota Direksi dan 2(dua) anggota Dewan Komisaris
 - b. Sumber Daya Manusia
Direksi dibantu oleh Pejabat Eksekutif yang meliputi Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern, fungsi Kepatuhan merangkap fungsi Manajemen Risiko dan Program APU, PPT & PPPSPM. Untuk kebutuhan bisnis telah dilengkapi Kepala Bagian Operasional dan Kepala Bagian Kredit. Komposisi pegawai sbb:

Unit Kerja	Level Pejabat	Jumlah Pegawai
Operasional	1 orang	15
Kredit	1 Orang	18
Audit Intern	1 orang	1
Kepatuhan/Manrisk	1 orang	1
SDM dan Umum	1 orang	7

3. Kondisi keuangan dan kapasitas teknis
PT. BPR Prima Dewata per posisi 31 Oktober 2023 memiliki
 - Modal inti Rp. 6.731.508.773
 - Volume usaha sebesar Rp. 53.051.211.098
 - Dengan total aset produktif sebesar Rp. 53.021.346.940
 - Penyaluran kredit sebesar Rp. 33.688.792.207PT. BPR. Prima Dewata per posisi 31 Oktober 2023 memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) sebesar 37,74%
4. Kerjasama dengan pihak eksternal
Dalam rangka melaksanakan program-program tersebut PT. BPR Prima Dewata akan melakukan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Perbarindo, Komunal, BLBI, serta Lembaga Pemerintahan wilayah Bali
5. Strategi komunikasi
Strategi komunikasi yang diterapkan adalah aktif dan partisipatif. Penerapan strategi komunikasi selalu memperhatikan budaya sopan santun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
6. Sistem *monitoring*, evaluasi, dan mitigasi

 4 A



No	Bulan	Nama Kegiatan	Monitoring	Evaluasi	Mitigasi
1.	Januari	Mengadakan sosialisasi khusus untuk bidang perkreditan tentang Aksi keuangan berkelanjutan	Pengawasan terhadap : 1. Waktu pelaksanaan sosialisasi 2. Jumlah Peserta 3. Kesesuaian Materi		
2.	Februari	Edukasi kepada masyarakat mengenai produk, keaslian uang dan perencanaan keuangan	Pengawasan terhadap : 1. Waktu pelaksanaan sosialisasi 2. Jumlah Peserta 3. Kesesuaian Materi		
3.	Maret	Penggunaan Lampu hemat energi/lampu menggunakan energi matahari	Pengawasan terhadap waktu pelaksanaan		
4.	April	Kegiatan berbagi Takjil	Pengawasan terhadap waktu pelaksanaan		
5.	Mei	Kegiatan efisiensi penggunaan kertas	Pengawasan terhadap waktu pelaksanaan		
6.	Juni	Kegiatan pengurangan sampah plastik	Pengawasan terhadap waktu pelaksanaan		
7.	Juli	Pembaharuan standar operasional sesuai perkembangan peraturan terkait Aksi Keuangan Berkelanjutan	Pengawasan terhadap waktu pelaksanaan		
8.	Agustus	Kebijakan pemberian kredit (mengenai penangugihan dampak polusi)	Pengawasan terhadap waktu pelaksanaan		
9.	September	Alokasi dana untuk kegiatan sosial	Pengawasan terhadap waktu pelaksanaan		
10.	Oktober	Kegiatan Edukasi dan Literasi mengenai produk, perencanaan keuangan	Pengawasan terhadap : 1. Waktu pelaksanaan sosialisasi 2. Jumlah Peserta 3. Kesesuaian Materi		

7. Kebijakan pemerintah

- Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

IV. PRIORITAS DAN URAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

1. Program A: Sosialisasi khusus untuk bidang perkreditan tentang Aksi keuangan berkelanjutan



 5

- a. Dasar Pemikiran
 Untuk tercapainya keuangan berkelanjutan, perlu dilakukan sosialisasi agar para pelaksana kegiatan memiliki pemahaman yang baik tentang Aksi Keuangan Berkelanjutan

b. Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Kegiatan
1	Sosialisasi khusus untuk bidang perkreditan tentang Aksi keuangan berkelanjutan	01/01/2024	30/06/2024	- Unit yang terlibat, antara lain: SDM, Bisnis, Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan/atau Keuangan	SDM dan Umum

c. Sumber Daya

Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan program A adalah Rp. 2.000.000

d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi kegiatan usaha terhadap target yang telah ditetapkan

e. Tantangan dan Rencana ke Depan

Tantangan terutama berasal dari faktor eksternal yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai ataupun kondisi sosial politik yang dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat

1. Program B: Meningkatkan portofolio kredit Mikro Kecil dan menengah

a. Dasar Pemikiran

Untuk tercapainya keuangan berkelanjutan, BPR harus didukung oleh masyarakat yang perekonomiannya semakin meningkat. Usaha mikro merupakan pihak yang harus dijadikan sasaran peningkatan ekonomi melalui pemberian pinjaman yang lebih berpihak, sehingga pada gilirannya akan menopang pengembangan keuangan berkelanjutan bagi BPR.

b. Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Kegiatan
1	Kebijakan pemberian kredit (mengenai penanggulangan dampak polusi)	01/01/2024	31/12/2024	- Unit yang terlibat, antara lain: SDM, Bisnis, Kepatuhan, Manajemen Risiko, Operasional	Team Bisnis

 6 A

- c. Sumber Daya
Alokasi biaya untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000
- d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program
Evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi kegiatan usaha terhadap target yang telah ditetapkan
- e. Tantangan dan Rencana ke Depan
Tantangan terutama berasal dari faktor eksternal yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai ataupun kondisi sosial politik yang dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat

V. TINDAK LANJUT RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Sistem *monitoring* dan evaluasi untuk menilai kemajuan secara keseluruhan, meliputi:

1. Pegawai, pejabat, dan/atau unit kerja yang bertanggung jawab terhadap *monitoring* dan evaluasi
Pelaksanaan Evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan diatas berada di bawah Divisi Audit Intern
2. Penentuan waktu untuk mengukur realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
Evaluasi dilakukan secara berkala, yaitu secara semesteran.
3. Tindak lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
Dalam hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan belum dapat terimplementasi sesuai harapan dan timeline yang direncanakan, maka bank akan melakukan tindaklanjut sebagai berikut:
 - Merencanakan Kembali ditahun berikutnya
 - Melakukan Analisa terhadap factor penyebab tidak terlaksananya Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
4. Mitigasi risiko dalam hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan
Untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan keuangan berkelanjutan, BPR melakukan perencanaan yang matang, monitoring serta evaluasi terhadap kegiatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Badung, 5 Desember 2023

Disusun oleh:



Agus Purnomo
Direktur Utama

Ditandatangani oleh:



Thony Wijaya
Komisaris Utama